

RELASI KUASA KIAI PESANTREN DAN PEJABAT PUBLIK DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MADURA (ANALISIS TEORI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT)

Evi Fatimatur Rusydiyah, Zaini Tamin AR

UIN Sunan Ampel Surabaya, STAI YPBWI Surabaya
evifatimatur@uinsby.ac.id, zainitamin@stai-ypbwi.ac.id

Abstract

One interesting political phenomenon today is the figure of the Kiai, who has a strong influence, both in communication and policy formulation. This study aims to analyze the relationship between pesantren Kiai and public officials in formulating Islamic education policies from the perspective of Michel Foucault. The method used in this research is qualitative by using naturalistic interpretative. Data collection techniques using interviews, observation, and capture literature. The results of this study reveal the relationship between pesantren Kiai and public officials are; 1) Patriarch. This relationship is a form of leadership that is based on relationships and leadership that is led. In social structure, Kiai is categorized as an elite structure. The Kiai has a strong formal and informal authority; 2) Collegial. This relationship is a bond or relationship like a partner or colleague (colleague). A collegial relationship occurs where several places can influence each other with different strengths. Both forms of relations in the Foucault's opinion occur because the Kiai has the power of science and public power that has political power. Relations between the occur in the formality of the Madurese community.

Keywords: Kiai, Islamic Boarding School, Public Officials, Political Education

Abstrak

Salah satu fenomena politik yang menarik saat ini adalah figur kiai yang memiliki pengaruh kuat, baik dalam komunikasi maupun perumusan kebijakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis relasi antara kiai pesantren dan pejabat publik dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam dalam perspektif Michel Foucault. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif dengan pendekatan interpretatif naturalistik. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi, dan literatur pemikiran. Hasil penelitian ini mengungkapkan bentuk relasi kuasa antara kiai pesantren dan pejabat publik adalah; 1) Patriarkis. Relasi ini merupakan bentuk kepemimpinan yang berdasarkan hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Dalam struktur sosial, Kiai dikategorikan dalam struktur yang elit. Kiai mempunyai harisma yang kuat baik secara formal maupun non formal; 2) Kolegial. Relasi ini merupakan sebuah ikatan atau interaksi layaknya mitra atau teman sejawat (kolega). Relasi kolegial terjadi di mana beberapa pihak dapat mempengaruhi satu sama lain dengan kuasa berbeda. Kedua bentuk relasi tersebut dalam pandangan Foucault terjadi karena kiai memiliki kuasa ilmu (*power of knowledge*) dan pejabat publik memiliki kuasa politik (*power of politics*). Relasi antara keduanya terjadi merujuk pada formalitas keadatan masyarakat Madura.

Kata Kunci: Kiai, Pesantren, Pejabat Publik, Politik Pendidikan

Article History: *Received 26 February 2020, Revised: 05 March 2020, Accepted: 30 April 2020, Available online 01 June 2020*

Pendahuluan

Sebagai negara dengan mayoritas komunitas muslim, Indonesia pada tingkatan daerah memiliki figur yang disebut kiai. Kiai merupakan figur pemimpin tertinggi di pesantren. Keberadaan kiai dalam pesantren berada pada posisi yang utama. Kiai merupakan pusat dari pergerakan organisasi di lembaga tersebut. Ia menjadi inspirator dan sumber ilmu bagi para santrinya. Figur kiai merupakan seorang inisiator, fasilitator, dan pemimpin tunggal dari lembaga pesantren tersebut.

Dalam konteks kepemimpinan, Speranza dan Pierce mengemukakan tiga komponen utama: *pertama*, kesadaran diri. Kesadaran diri meliputi pengetahuan, visi, motivasi, kekuatan diri, dan emosi. *Kedua*, Internalisasi nilai moral, internalisasi moral adalah proses pengaturan diri yang digunakan oleh individu untuk membimbing mereka membuat keputusan menggunakan nilai-nilai dan moral internal mereka. *Ketiga*, transparansi relasional. Transparansi relasional didefinisikan sebagai menampilkan diri secara terbuka dan jujur kepada orang lain (Speranza & Pierce, 2019 : 168). Ketiga

komponen tersebut melekat pada seorang kiai yang mengisyaratkan bahwa kiai memiliki pengetahuan tinggi yang merupakan sumber nilai-nilai dan moral. Selain itu, kiai memiliki kharisma ketokohan yang diakui masyarakat. Dengan kekuatan kharisma yang dimiliki, kiai merupakan seorang pemimpin yang tidak hanya di pesantren tetapi juga menjadi pemimpin di masyarakat.

Kiai memiliki peran yang urgen dalam mempengaruhi arah kebijakan pendidikan di pesantrennya. Peran urgen tersebut mempengaruhi kondisi pesantren di mana mereka tinggal. Pesantren akan diarahkan pada sistem yang terbuka (*modernist*) atau tertutup (*salafy*). Di luar pesantren, kiai dapat memimpin sebuah organisasi keagamaan, kemasyarakatan, bahkan figur kiai dapat bersinergi dan berpartisipasi di bidang politik (AR, 2015). Penelitian Akhmad Siddiq dapat dijadikan pembenaran bagaimana kiai terlibat dalam percaturan politik. Penelitian yang mengambil objek di Madura ini menintrepretasikan sosok Kiai memiliki intensitas yang tinggi dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat saat Pemilu. Partisipasi para Kiai menunjukkan bahwa masyarakat sangat dekat dengan mereka (Siddiq, 2012).

Di tengah masyarakat, kiai memiliki pengaruh kuat yang muncul dari kharisma dan *trah* (*nasab*). Di Madura misalnya. Bagi masyarakat Madura, kiai memiliki peran penting, baik sebagai pemimpin agama ataupun sebagai pemberi solusi bagi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Siddiq, 2012). Peran Kiai tidak hanya pada aspek personal, tetapi juga aspek sosial. Kiai dapat juga berfungsi sebagai penyaring dari *transfer of culture* (Faridl, 2007 : 238). Dalam kondisi tersebut, figur kiai berperan sebagai agen kebudayaan di lingkungan sosial masyarakat.

Sebagai agen budaya, kiai dikategorisasikan dalam golongan elit. Ia dapat mempengaruhi birokrasi di tingkat lokal baik secara formal ataupun nonformal. Istilah formal merujuk

pada posisi kiai yang memiliki jabatan tertentu secara administratif seperti jabatan legislatif, eksekutif, ataupun yang lain. Pada tataran non-formal, kiai menduduki jabatan strategis, seperti organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Dalam konteks ini, kiai memiliki pengaruh langsung kepada masyarakat Madura. Oleh sebab itu, penulis memilih Madura sebagai objek penelitian mengingat kiai memiliki peran begitu dominan di wilayah publik, khususnya dalam bidang politik.

Dalam artikel ini, penulis ingin membahas dua variabel yang menjadi fokus masalah: pengetahuan dan kekuasaan. Pengetahuan yang penulis maksud adalah representasi dari kiai. Sementara kekuasaan selalu melekat pada pejabat publik. Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan beroperasi untuk memperbaiki dan memaksakan identitas pada subyeknya (Deacon, 2005 : 73–83). Penggunaan identitas ini merupakan istilah penting pada kekuasaan. Foucault, menjadikan pembenahan identitas sebagai pusat dari kebenaran dan makna yang dibangun oleh kekuasaan. Pada akhirnya, dinamika hubungan pengetahuan dan kekuasaan yang digariskan Foucault selaras oleh interpretasi ini (Foucault, 1984 : 109)

Dalam konteks kebijakan publik, maka komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah, keterlibatan *stakeholder*, tokoh dan juga masyarakat berperan penting. Pada kondisi inilah figur kiai – yang merupakan figur yang begitu dihormati di lingkungan masyarakat Madura – dilibatkan dan ikut andil dalam merumuskan kebijakan, terutama pendidikan Islam. Untuk itu, artikel ini mencoba menganalisis hal tersebut. Sehingga memberikan gambaran jelas bagaimana relasi antara kiai pesantren dan pemangku kebijakan – dengan otoritas masing-masing – dalam proses perumusan kebijakan pendidikan Islam di Madura.

Theoretical Framework

Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan dari Michel Foucault. Teori ini

digunakan untuk mengungkap relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik yang terjadi di Madura. Menurut Foucault, kekuasaan (*power*) tidak pernah terlepas dari pengetahuan (*knowledge*). Begitupun sebaliknya. Kedua hal tersebut saling terikat. Tidak ada hubungan *power* tanpa pembentukan *knowledge*. Dan sebaliknya, tidak ada pembentukan *knowledge* tanpa kepemilikan *power* (Woermann, 2012).

Foucault, telah menulis tentang sejarah pengetahuan terkait manusia jauh sebelum dia secara eksplisit mengajukan pertanyaan tentang kekuasaan. Yang menarik bagi Foucault bukanlah rumusan khusus pengetahuan yang dihimpun melalui investigasi disiplin di berbagai bidang. Foucault, telah menulis tentang konteks epistemik di mana “institusi” pengetahuan menjadi dimengerti dan berwibawa. Dia berpendapat bahwa penelitian khusus disusun dengan konsep dan pernyataan yang dapat dipahami bersama, bagaimana pernyataan-pernyataan tersebut disusun secara tematis dan prosedural untuk dinilai kredibilitasnya serta dianggap sebagai legitimasi (Foucault, 1989 : 11–14).

Pemahaman Foucault tentang kekuasaan secara fundamental bersifat relasional. Foucault, mengakui bahwa fitur kunci dari perkembangan negara modern adalah pergeseran hubungan kekuasaan. Foucault, menyarankan hal tersebut dalam kekuasaan masyarakat kontemporer tidak lagi menjadi "hak istimewa" yang mungkin dimiliki seseorang, melainkan beroperasi dalam jaringan hubungan secara terus-menerus (Foucault, 1977 : 26–27). Dengan kata lain, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh aktor tertentu dan menguasai orang lain. Justru hal tersebut diproduksi bersama dalam interaksi sosial melalui cara seseorang menegosiasikan makna dalam hubungan pengetahuan-kekuasaan yang ada.

Terdapat beberapa aspek keterkaitan antara kekuasaan dan pengetahuan. Sebut saja peran bahasa. Foucault berargumen bahwa bahasa menjadi instrumen dalam mengartikulasikan kekuasaan. Gagasan tersebut melihat bahasa bukan hanya sebagai media berkomunikasi. Lebih dari

itu, bahasa memiliki *powerfully propaganda* dan mobilisasi wacana. Selanjutnya, bahasa dengan menerapkan secara *emansipatoris* mengemukakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan turut menunjukkan pola komunikatif, diskursif, kritis dalam kehidupan sosial (Foucault, 1984 : 109). Foucault juga mengatakan bahwa kekuasaan merupakan strategi yang bukan hanya milik satu orang. Kekuasaan dipahami sebagai sebuah praktik menjalankan otoritas yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu. Dalam sebuah kekuasaan, ada beberapa posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain senantiasa mengalami pergeseran. Dalam kondisi tersebut, kekuasaan menentukan aturan, strata dan hubungan dari internal sebuah organisasi. Pada akhirnya, kekuasaan bersinggungan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi otoritas tertentu dibentuk dan berkembang (Foucault, 1980).

Foucault, mengatakan bahwa kekuasaan tidak saja berada dalam ranah pemerintah, tetapi juga berada dalam ranah rakyat. Misalnya kuasa pengetahuan berada di tangan ulama, di mana pada tataran tertentu bisa dijadikan sarana mobilisasi politik (Hindess, 1996). Argumen Foucault terkait hal tersebut adalah pengetahuan khusus (yang dimiliki ulama/kiai) dapat diatur dan diaktifkan dalam berbagai wacana (misalnya kepemimpinan otokratis). Karena tidak ada pernyataan di luar dunia wacana, setiap pernyataan atau "klaim kebenaran" yang dibuat berbentuk diskursif. Selanjutnya, setiap kebenaran klaim yang dibuat dalam wacana tertentu adalah latihan kekuasaan - dengan yang lebih besar atau lebih kecil dampak tergantung pada konteks praktik di mana ia dibuat. Oleh sebab itu, pendekatan Foucault mengarahkan perhatian kepada otoritas wacana tertentu dalam konteks budaya dan sejarah yang diberikan - yang lebih luas hubungan pengetahuan dan kekuasaan - sebagai cara memahami bagaimana beberapa orang mengklaim pengetahuan menjadi lebih kuat dari yang lain.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis angkat, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Strauss & Corbin, 2003 : 4). Dengan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, penulis menggunakan pendekatan interpretatif naturalistik terhadap subjek kajiannya (Denzin & Lincoln, 2009 : 2). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena tentang sebuah persepsi, motivasi, dan tindakan secara komprehensif. Melalui deskripsi data-data berikut analisisnya, pada suatu konteks khusus penelitian ini mengungkapkan relasi kuasa antara kiai pesantren dan pejabat publik di Madura.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan survei kepada sejumlah kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan Madura. Selain itu, didukung dengan metode dokumentasi yang terkait dengan topik penelitian ini (Bogdan & Biklen, 1992 : 2). Sehingga penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan pola deduktif untuk mencari makna (*meaning*) yang esensial dalam penelitian ini (Halpin & Troyna, 1994 : 200–215).

Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, langkah selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut. Pada dasarnya peneliti telah melaksanakannya mulai dari awal hingga akhir penelitian. Dengan cara tersebut, diharapkan terdapat konsistensi analisis data secara holistik dalam proses analisis terkait relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik yang terjadi di Madura. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan (reduksi data, display data, verifikasi) dan setelah dari lapangan (Sugiyono, 2009 : 336–337). Mengenai kriteria kredibilitas, penulis melibatkan penetapan hasil penelitian ini adalah kredibel atau dapat dipercaya. Sementara, kiat-kiat untuk meningkatkan kredibilitas data tersebut, peneliti melakukan

beberapa hal di antaranya: mempanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, dan triangulasi.

Hasil Penelitian

Sebagai pemimpin, kiai memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan masyarakat. Dalam konsep kekuasaan Foucault, kiai memiliki mode tindakan yang dapat mempengaruhi tindakan orang lain, serta dapat mengatur perilaku orang lain (Dreyfus & Rabinow, 1983 : 221). Ini konseptualisasi kekuasaan yang mensyaratkan bahwa tidak mungkin ada masyarakat tanpa relasi kekuasaan (Ingram, 2005 : 119–138). Kekuasaan dapat bertindak untuk memodifikasi tindakan masyarakat selama mereka memiliki kapasitas untuk bertindak dalam berbagai cara (Patton, 1994 : 60–71). Dalam hal ini, kiai di Madura memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut. Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan bahwa relasi antara dan kiai dan pejabat publik di Madura nyaris tidak terpisahkan. Beragam data penulis uraikan untuk kemudian dianalisis dan dihasilkan temuan.

Relasi Kuasa Kiai Pesantren dan Pejabat Publik; Perspektif Foucault

Kiai dalam konteks ini adalah kiai pesantren merupakan pemegang “otoritas” dalam persoalan keagamaan, yang berposisi sangat terhormat. Melalui posisi tersebut, kiai mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para santrinya. Dengan potensi itu, tidak jarang sosok kiai terlibat – atau sengaja dilibatkan – dalam percaturan di bidang politik hingga pendidikan pada masing-masing daerahnya. Sejarah mencatat bahwa Indonesia saat diliputi masa-masa kolonial, sosok kiai tampil di garda terdepan dalam mengobarkan semangat anti kolonialisme kepada masyarakat. Sebut saja, KH. Hasyim Asy’ari yang mencetuskan gaung resolusi jihad pada para santrinya yang kemudian menjadi kesadaran kolektif masyarakat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (Ja’far, 2012). Disusul dengan beberapa tindakan konkrit kiai dalam perumusan Badan

Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Kiprah KH. Wahid Hasyim dan KH. Masykur semakin menguatkan kepedulian kiai dan sikap nasionalisme, sehingga sekaligus ini mengafirmasi embrio kedekatan dan keterkaitan kiai pesantren dengan pejabat publik hingga saat ini.

Konsekuensi logis kedekatan kiai pesantren dengan pejabat publik tersebut adalah kiai dapat terlibat langsung dan menjadi politisi yang masuk pada sistem pemerintahan. Dengan keterlibatan tersebut, kiai pesantren juga ikut andil dalam melaksanakan rencana dan kegiatan politik, misalnya mendulang suara melalui kampanye, mendaftarkan diri dalam sebuah pemilihan kepala daerah atau anggota dewan, dan sebagainya. Di lain pihak, kiai pesantren dapat pula menjadi figur yang secara struktural tidak dikategorikan sebagai aktor politik, akan tetapi secara sosial mereka memiliki ruang untuk berperan dalam situasi politik yang sedang berkembang. Hal ini dinyatakan oleh KH. Fakhriillah Aschal, pengasuh pondok pesantren Syaichona Cholil Bangkalan Madura:

“Dewasa ini, kita bisa melihat begitu dekatnya kiai dengan pejabat publik di Madura. Tidak hanya dekat, bahkan sebagian telah menjadi pengurus partai politik. Artinya, kiai sendiri ikut andil dalam bidang politik. Sebenarnya hal ini terjadi sudah lama. Namun relasi kiai pesantren dan pejabat publik menjadi lebih intens, serta keikutsertaan kiai di bidang politik semakin gencar, terjadi sejak era reformasi”.. (KH. Fakhriillah Aschal, 3 Oktober 2019)

Relasi kuasa kiai dengan pejabat publik di Madura salah satunya disebabkan karena efektifitas komunikasi kiai pesantren di tengah-tengah masyarakat. Otoritas sebagai pemimpin agama secara legitimatif juga menjadi faktor kuat betapa kiai pesantren memiliki kredibilitas dalam kehidupan sosial masyarakat Madura. Di sisi lain, anggapan masyarakat Madura bahwa kiai merupakan guru, dan guru dalam tatanan masyarakat adalah seseorang yang harus dihormati, maka hal

tersebut memudahkan kiprah kiai dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan sekalipun.

Dengan posisi sosial dan otoritas sebagai pemimpin agama, kiai memiliki *power effect* (Kittel, Kanitsar, & Traub, 2017). *Power effect* inilah yang dapat menjadi atribut untuk berinteraksi dengan pejabat publik. Dengan *power effect* itu pula kiai dapat terlibat langsung dalam pemerintahan. Dengan kata lain, kiai pesantren menjadi pejabat publik itu sendiri. *Power effect* seorang kiai pesantren pada gilirannya, menentukan sejauh mana kuasa kiai pesantren terhadap kuasa pejabat publik. Terlebih, sebagai figur sentral pesantren dan masyarakat, kiai memiliki posisi yang kuat secara struktural. Oleh sebab itu, penulis menganalisis bahwa bentuk relasi kuasa kiai dengan pejabat publik di Madura dapat dipetakan menjadi dua, yaitu:

Patriarkis

Relasi kuasa patriarkis merupakan bentuk kepemimpinan yang berdasarkan hubungan *patron-client* atau pemimpin dan yang dipimpin atau bapak dan anak. Dalam konteks ini antara kiai dengan santrinya. Pola tersebut merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang berasal dari status sosial, kekuatan, atau pendapatan yang berbeda, yang menempatkan klien di posisi yang lebih rendah dan pelindung di posisi yang lebih tinggi. Sebagai pelindung, seseorang berada dalam posisi yang mengharuskan membantu kliennya.

Relasi patriarkis antara kiai pesantren dan pejabat publik di Madura ditunjukkan oleh keterikatan, tanggung jawab moral dan emosional, kepercayaan, dan empati. Hal ini mempertegas pendapat Auyero (2009), bahwa karakteristik hubungan tersebut adalah: *Pertama*, khusus. Individu terlibat dalam masalah pribadi mereka sendiri dan bukan dalam masalah umum. *Kedua*, pribadi. Hubungan didasarkan pada tanggung jawab interpersonal, diwakili oleh kesetiaan dan timbal balik. *Ketiga*, sukarela. Seseorang dapat berpartisipasi atau meninggalkan hubungan secara sukarela. *Keempat*,

terorganisir. Karakteristik informal berarti tidak ada legalitas atau kontrak, tetapi terorganisir dalam tradisi simbolik.

Dalam konteks kuatnya peran kiai, relasi patriarkis menjadi titik pangkal kiprah kiai, baik secara formal maupun non-formal dalam pemerintahan. Hal ini ditegaskan oleh KH. Syafik Rofi'i berikut ini:

“..Secara formal, kiai di Madura terlibat langsung dalam pemerintahan. Dengan kata lain, kiai menjadi pejabat, seperti Kiai Fuad Amin, Kiai Abdul Latif Amin, Kiai Makmun Fuad, yang ketiganya pernah atau sedang menjabat sebagai Bupati Bangkalan Madura. Saya juga masuk dalam kategori ini, karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati di zaman Kiai Fuad Amin. Secara non-formal, kiai menjadi pemimpin/pengurus organisasi kemasyarakatan atau tidak menjadi pengurus, namun memiliki pengaruh langsung di masyarakat. Terlebih, pemangku kebijakan tersebut pernah nyantri kepada Sang Kiai, atau menjadi bagian dari masyarakat yang ta'dhim kepada kiai..” (KH. Syafik Rofi'i, 11 November 2019).

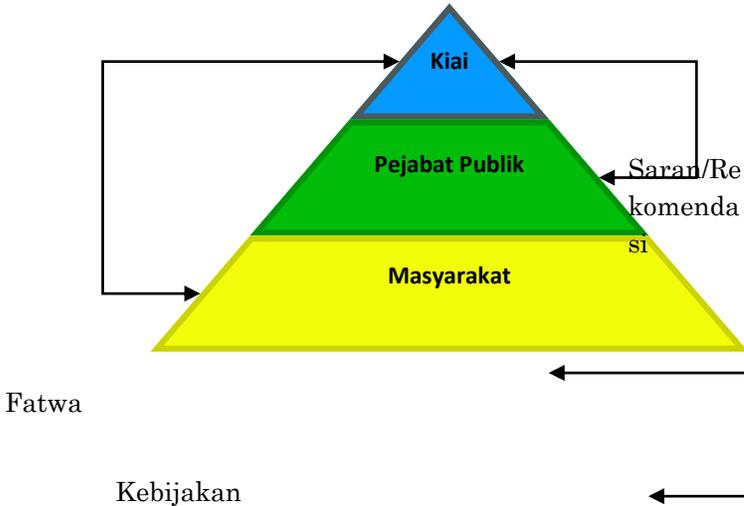
Pernyataan KH. Syafik Rofi'i selaras dengan pendapat Kiai Ali Ridho, yang merupakan salah seorang pengasuh pondok pesantren di Pamekasan Madura. Berikut pernyataannya:

“..Tidak bisa dipungkiri, pemerintahan di Pamekasan ini selalu terikat dengan kiai, *lora*, ustadz dan elemen-elemen pesantren lainnya. Di sini *Lora* Badrut Tamam dapat dijadikan contoh. Beliau seorang yang berasal dari pesantren yang saat ini menjabat sebagai Bupati Pamekasan. Kontribusinya jelas bagi pendidikan Islam di sini. Bupati telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengembangkan pendidikan Islam di sini, mulai dari pendidikan sekolah, madrasah hingga pesantren. Salah satu yang paling pokok adalah terkait pendanaan dan pembinaan bagi madrasah diniyah dan pesantren yang ada di daerah-daerah terpencil” (Kiai Ali Ridho, 7 Oktober 2019)

Berdasarkan pendapat KH. Syafik Rofi'i dan Kiai Ali Ridho, maka peran kiai mengalami transformasi, dari (hanya) dalam bidang agama menuju bidang politik. Hal ini tidak lepas dari kharisma dan kepercayaan masyarakat yang begitu kuat. Sehingga, dalam kondisi tersebut seorang kiai tidak hanya berkoordinasi, namun juga dapat membuat kebijakan dengan otoritasnya sebagai pejabat publik. Hal ini dikuatkan dengan pendapat M. Subchan Aziz, salah seorang anggota dewan Kabupaten Bangkalan Madura:

“..Di Bangkalan Madura ini rasa *ta'dhim* kepada kiai sangat luar biasa. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap guru sekaligus “orang tua” yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman semasa di pesantren. Saya pun demikian. Meski sekarang menjabat sebagai anggota dewan di Bangkalan, rasa *ta'dhim* itu tidak dapat dihilangkan, karena saya pernah nyantri di sebuah pesantren di sini. Jadi, saran kiai kepada saya akan menjadi pertimbangan positif dalam merumuskan suatu kebijakan. Sebagai contoh, ketika Kiai Fahrillah Aschal bersama para Kiai yang lain mengajukan Bangkalan sebagai kota dzikir dan shalawat. Kami pun meresponnya dengan baik. Saran itu jelas positif bagi masyarakat Bangkalan, terutama dalam pendidikan spiritual.” (M. Subchan Aziz, 16 Juli 2019).

Dengan pandangan bahwa Islam adalah agama tidak dikotomistis-yang memberikan gap antara agama dan negara-telah menopang fenomena ini. Terlebih, hal tersebut didukung oleh konstruksi keadatan masyarakat di Madura. Oleh karena itu, relasi patriarkis antara kiai pesantren dengan pejabat publik di Madura menjadi hal yang lumrah terjadi. Jika diuraikan dalam bentuk diagram, maka dapat petakan berikut ini :



Dari gambar di atas, dapat dipahami bahwa begitu sentral dan kuatnya pengaruh dan relasi kiai pesantren di Madura. Relasi tersebut dapat bersifat *top down* sekaligus *bottom-up*. Secara *top-down*, seorang kiai pesantren dapat memberikan rekomendasi atas beberapa kebijakan pendidikan Islam. Pada saat yang sama, kiai juga dapat mempengaruhi masyarakat melalui fatwa-fatwanya. Sementara, secara *bottom-up*, pejabat publik dan masyarakat *sowan* untuk mendapatkan saran (*wejangan*) dari kiai pesantren terkait berbagai macam persoalan. Bagi pejabat publik, saran (*wejangan*) tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam di Madura.

Kolegial

Relasi kuasa kolegial adalah sebuah ikatan atau interaksi yang dilakukan secara bersama-sama layaknya mitra atau teman sejawat (kolega). Dalam hal kepemimpinan, untuk mengambil keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan koordinasi, yang mana semua pihak ikut secara langsung dalam proses tersebut, termasuk kiai. Perkembangan kedekatan hubungan antara kiai dan pejabatan publik secara

hirarkies mengalami pola yang demikian. Relasi tersebut ibarat mitra atau teman sejawat mengingat mayoritas pejabat publik di Bangkalan masih mengutamakan tradisi pesantren dan sebagian berasal dari kalangan santri. Untuk mengkonfirmasi hal ini, penulis melakukan wawancara dengan KH. M. Nasih Aschal, wakil pengasuh pondok pesantren Syaichona Cholil, berikut ini:

“Saya kira hubungan antara kiai dan pejabat publik di Bangkalan Madura sangat harmonis. Saya sudah terbiasa berinteraksi dengan para pejabat publik di sini. Dalam bahasa orang Madura, kami adalah *kancah* (teman atau sahabat). Dan tentang birokrasi, saran saya dan para kiai di sini menjadi pertimbangan bagi pejabat publik di Bangkalan. Saya menjalin komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Departemen Agama, atau Dinas Pendidikan. Komunikasi seperti ini bertujuan untuk memberi masukan bagaimana penyelenggaraan pendidikan Islam di sini..” (KH. M. Nasih Aschal, 2 Desember 2019).

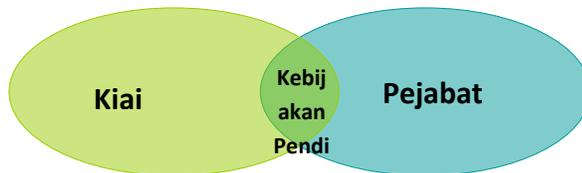
Adanya sebuah hubungan erat kiai dengan pejabat publik di Madura dapat diindikasikan sebagai tindak kepedulian layaknya kolega dalam saran untuk merumuskan kebijakan pendidikan Islam. KH. Mondir Rofi'i memberikan keterangan berikut ini:

“..Kiai di sini mempunyai keterikatan yang erat dengan pemerintah daerah Bangkalan Madura. Ini adalah sebuah kewajiban sekaligus menjaga daerah ini agar tetap religius. Ketika saya menjabat sebagai wakil Bupati Bangkalan di era Bupati Kiai Makmun Ibnu Fuad, saya sering bertemu dengan para kiai di sini seperti KH. Zubair Muntashor, KH. Mohammad Faisol Anwar, KH. Fakhrihlah Aschal, dan lain sebagainya. Hal ini saya lakukan untuk sekedar berdialog atau silaturahmi. Dan kebutulan para kiai di Bangkalan adalah saudara dan sahabat saya. Sehingga interaksi ini menjadi inspirasi untuk pemangku kebijakan..” (KH. Mondir Rofi'i, 30 September 2019).

Untuk mengkonfirmasi pendapat KH. Mondir Rofi'i di atas, penulis melakukan wawancara dengan Abdul Hamid, salah seorang pejabat di Kementerian Agama wilayah Bangkalan. Berikut pemaparannya:

“..Hubungan antara Kementerian Agama dengan para kiai (ulama) di sini baik sekali. Kami sebagai aparat pemerintah berkewajiban untuk *manage* dan bekerjasama dengan para tokoh agama. Terlebih, dalam beberapa hal yang berhubungan dengan keagamaan dan pendidikan Islam. Karena, seluruh kegiatan yang ada di Kementerian Agama ini berkaitan dan bersentuhan dengan kiai pesantren di Madura. Jadi, seluruh kegiatan itu harus didukung oleh para kiai. Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi dan kerja sama harus baik. Dan, *alhamdulillah* selama ini tidak pernah ada masalah.” (Abdul Hamid, 19 September 2019).

Secara ideal, berdasarkan hasil wawancara tersebut, telah memberi gambaran mengenai relasi kuasa antara kiai dan pejabat publik yang berlangsung baik, dan sebagaimana mitra atau kolega dalam sebuah tatanan sosial. Bentuk relasi kolegial dalam aspek kebijakan publik, merupakan hal yang memang sudah semestinya terjadi. Pendidikan Islam (tidak terkecuali pesantren yang berada di bawah kepengasuhan kiai) dalam ranah pendidikan di Indonesia adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pandangan semacam ini telah disinggung oleh Thomas R. Dye (2001), William N. Dunn (2002) dan Anderson (1998) dengan titik tekan pada kebijakan yang seharusnya dikonsepsi serta dikembangkan oleh penyelenggara pemerintahan. Bentuk relasi tersebut dapat dikatakan sebagai relasi kolegial: relasi yang terjadi di mana beberapa pihak dapat mempengaruhi satu sama lain dengan otoritas dan kuasa yang berbeda. Relasi kolegial antara kiai pesantren dan pejabat publik di Madura dapat dipetakan melalui gambar di bawah ini:



Gambar di atas menunjukkan bahwa relasi kolegial terjadi di mana kiai pesantren dan pejabat publik menjalin komunikasi dan interaksi seperti mitra/teman/kolega yang satu sama lain sejajar dan saling mempengaruhi. Interaksi terjadi dengan latar belakang otoritas dan kuasa masing-masing, dan bersifat simbiosis mutualisme. Dengan kuasa ilmu (agama) yang dimiliki kiai pesantren dan dengan kuasa politik (jabatan) yang diemban oleh pejabat publik, kedua pihak bermitra dengan berorientasi pada tujuan yakni perumusan kebijakan. Dari relasi kolegial yang terjadi antara keduanya, menghasilkan kebijakan pendidikan Islam berdasarkan musyawarah baik dalam forum formal ataupun non formal.

Untuk memetakan relasi kuasi kiai pesantren dan pejabat publik di Bangkalan Madura, maka penulis deskripsikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Bentuk Relasi Kuasa Kiai Pesantren dan Pejabat Publik

No	Bentuk Relasi	Keterangan	Figur Kiai	Figur Pejabat Publik
1	Patriarkis	Relasi patriarkis merupakan bentuk kepemimpinan yang berdasarkan hubungan pemimpin dan yang dipimpin atau bapak dan anak, dalam konteks ini antara kiai dengan santrinya. Seorang kiai pesantren merupakan guru, pemimpin sekaligus <i>role model</i> bagi para santri, di mana	KH. Fuad Amin (Pembina pondok pesantren Syaikhona Kholil) KH. Syafik Rofii (Pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah), Lora Badrut Tamam (Bupati Pamekasan), KH.	KH. Fuad Amin (Bupati Bangkalan 2003-2013), KH. Syafik Rofii (Wakil Bupati Bangkalan 2008-2013), Lora Badrut Tamam (Bupati Pamekasan), R. Makmun Ibnu Fuad (Bupati Bangkalan 2013-2018),

		<i>dawuhnya</i> harus ditaati.	Fakhrillah Aschal (Pengasuh pondok pesantren Syaikhona Kholil), KH. Zubair Muntashor (Pengasuh pondok pesantren Nurul Cholil), KH. Muhammad Faisol Anwar (Pengasuh pondok pesantren Al Kholiliyah An Nuroniyah)	R.KH. Abdul Latif Amin (Bupati Bangkalan 2019-2024), Subchan Aziz (Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan 2014-2019)
2	Kolegial	Relasi kolegial adalah sebuah ikatan atau interaksi yang dilakukan secara bersama-sama layaknya mitra atau teman sejawat (kolega). Dalam hal kepemimpinan, untuk mengambil keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan koordinasi, yang mana semua pihak ikut secara langsung dalam proses tersebut.	KH. M. Nasih Aschal (Wakil pengasuh pondok pesantren Syaichona Cholil), KH. Muhammad Faisol Anwar (Pengasuh pondok pesantren Al Kholiliyah An Nuroniyah), Kiai Ali Ridho (Pengurus pondok pesantren Bata-Bata Pamekasan)	Abdul Hamid (Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan), KH. Mondir Rofi'i (Wakil Bupati Bangkalan 2013-2018), Lora Badrut Tamam (Bupati Pamekasan)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa pada relasi patriarkis, seorang kiai menjadi pimpinan atau pengasuh sebuah pondok pesantren sekaligus menjadi seorang pejabat publik. KH. Fuad Amin, KH. Syafik Rofi'i, Lora Badrut Tamam, adalah figur yang mencerminkan hal ini. Selain itu, seorang pejabat publik akan patuh terhadap saran dan masukan kiai pesantren. Figur pejabat publik tersebut misalnya: R. Makmun Ibnu Fuad (Bupati Bangkalan 2013-2018), R.KH. Abdul Latif Amin (Bupati Bangkalan 2019-2024) dan Subchan Aziz (Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan 2014-2019). Kepatuhan mereka dikarenakan dua hal; *Pertama*, kultur masyarakat Madura yang memosisikan kiai sebagai guru yang harus dihormati. *Kedua*, figur pejabat publik adalah seorang santri, di mana rasa *ta'dhim* kepada kiai harus diutamakan. Sementara, seorang kiai pesantren dapat menjadi mitra bagi pejabat publik, begitupun sebaliknya. Unsur kemitraan atau teman sejawat ini membentuk relasi kolegial di antara kedua pihak.

Sebagai implikasi dari relasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangkalan Madura menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Pendidikan Pasal 24 mengenai bentuk dan program pendidikan formal dan non formal serta pasal 72, 73 dan 74 mengenai pendanaan program pendidikan di Bangkalan. PERDA tersebut adalah bagian dari pengembangan pendidikan Islam di Bangkalan Madura. Melalui Peraturan Daerah tersebut, pendidikan Islam di Bangkalan Madura difasilitasi pemerintah daerah, terutama dalam hal pendanaan. Alokasi dana diperuntukkan bagi pendidikan formal, bahkan pendidikan non formal seperti Majelis Taklim dan Taman Pendidikan al-Qur'an. Sementara kiai pesantren berperan untuk mengawasi implementasi kebijakan pendidikan Islam yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Hasil dari paparan terkait relasi patriarkis di atas, diperkuat dari hasil wawancara berikut:

Penulis: Seperti apa relasi yang terjadi antara Anda dengan pejabat publik di Bangkalan?

KH. M. Faisol Anwar: Sangat dekat sekali. Di Madura, khususnya di Bangkalan berlaku sistem *Buppa'*, *Bhubbu'*, *Ghuruh*, *Rato*. Keempat hal tersebut memiliki posisi yang begitu dihormati di tengah masyarakat. Dan, *Ghuruh* di sini direpresentasikan oleh figur kiai. Saya sebagai pengasuh pondok pesantren sering berinteraksi dengan banyak pejabat di sini. Terlebih banyak pejabat yang masih saudara saya. Ada juga pejabat yang dulunya pernah nyantri di sini. Mereka (pejabat) sering datang ke rumah saya untuk membicarakan mengenai kebijakan-kebijakan, terutama sekali kebijakan pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah-madrasah dan lain sebagainya.

Penulis: Apa yang menyebabkan dekatnya hubungan antara kiai pesantren dan pejabat publik di sini?

KH. Fakhrillah Aschal: Ada banyak faktor, di antaranya: *pertama*, kultur masyarakat Madura yang mengutamakan *adhab asor* (kesopanan). *Adhab asor* ini berlaku kepada teman sebaya, orang yang lebih tua, lebih-lebih kepada kiai. *Kedua*, sejarah. Dalam sejarah Madura, mulai zaman pra kemerdekaan, kemerdekaan, orde baru, reformasi, hingga saat ini kiai menjadi sosok panutan yang ditaati oleh masyarakat, tidak terkecuali pejabat di sini. *Ketiga*, hubungan keluarga. Kebanyakan pejabat di sini masih adik, keponakan bahkan anak saya sendiri. Jadi, saran saya selalu didengarkan untuk kemajuan Bangkalan. *Keempat*, hubungan guru-murid. Beberapa santri saya ada yang menjadi DPRD, ada juga menjadi pimpinan dinas pendidikan atau Kemenag.

Penulis: Apakah ada figur kiai pesantren yang menjadi pejabat publik di Pamekasan?

KH. Hasani Zubair: Ada. Beberapa Kiai dan *Lora*. Bupati di sini adalah figur pesantren. Beliau memiliki pondok pesantren dan banyak santrinya. Beberapa anggota dewan juga dari figur Kiai dan *Lora*. Masyarakat sangat percaya

dengan sosok dari pesantren. Karena dipercaya akan membawa Kabupaten Pamekasan menjadi lebih baik dan religius.

Sementara, paparan terkait relasi kolejial, diperkuat dari hasil wawancara di bawah ini:

Penulis: Siapakah yang lebih dulu melakukan komunikasi? Anda atau pejabat publik di sini?

KH. Makki Nasir: Pada saat tertentu saya dan beberapa kiai yang melakukan kontak lebih dahulu. Misalnya dalam membahas hari santri nasional, pengajian-pengajian atau kegiatan keagamaan lain. Pada saat yang lain, mereka (pejabat publik), mulai dari Bupati, DPRD, Kepala Dinas dan lain-lain melakukan silaturahmi, dalam bahasa Madura disebut *acabis* atau *sowan* dalam bahasa Jawa. Hal yang dibahas beragam, mulai dari kebijakan pengembangan pendidikan, pengembangan pesantren dan yang terbaru di tahun 2019 ini, kebijakan bantuan dana apresiasi kepada guru madrasah diniyah dan guru ngaji di kampung-kampung.

Penulis: Bagaimana posisi kiai terhadap pejabat publik? Bagaimana pula posisi pejabat publik terhadap kiai?

Lora Muhammad Salim: Saya kira sejajar ya. Keduanya mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Prinsipnya, *ulama* (kiai) harus berdampingan dan sejalan dengan *umara'* (pemimpin). Dalam sejarah peraban Islam disebutkan begitu. Dan itu berlaku hingga saat ini. Terlebih, di era globalisasi dan industrialisasi di Madura. Komunikasi di antara kita (kiai dan pejabat publik) harus terjalin bagus dan intens. Karena hal inilah yang akan menentukan masa depan Pamekasan atau Madura secara umum.

Penulis: Apa dampak relasi antara kiai pesantren dan pejabat publik di Madura?

Hosyan: Dampaknya jelas positif. Meskipun saya bukan dari kalangan pesantren. Tetapi sebagai anggota dewan di sini, saya merasa perlu berkomunikasi dengan para kiai pesantren. Karena rumusan kebijakan pendidikan harus selaras dengan masyarakat. Dan, saya kira figur kiai selain pemimpin pesantren juga sebagai pemimpin

masyarakat Madura. Maka, dengan melakukan komunikasi dan koordinasi akan membuat kebijakan mendapat dukungan. Ada beberapa kebijakan yang melibatkan kiai pesantren, misalnya penahbisan Bangkalan sebagai kota dzikir dan shalawat, pemberian bantuan dana kepada madrasah dan lain sebagainya.

Dari penyajian dan analisis data yang penulis tuangkan di atas, maka penelitian ini menguatkan apa yang diungkapkan oleh Foucault, bahwa kekuasaan tidak pernah lepas dari pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan kerap bertali temali. Tidak ada hubungan kekuasaan tanpa sebuah konstruksi yang berkaitan dengan pengetahuan. Tidak ada pengetahuan yang tidak membentuk serta berkaitan dengan kekuasaan. Kedua bentuk relasi tersebut dalam bahasa Foucault, terjadi karena kiai yang memiliki kuasa ilmu (*power of knowledge*) dan pejabat publik memiliki kuasa politik (*power of politics*) (Foucault, 1980). Relasi antara kiai pesantren dan pejabat publik terjadi merujuk pada formalitas keadatan masyarakat Madura, yang ditopang oleh sejarah di mana *ulama'* berdampingan dengan *umara'* (pejabat publik). Relasi kuasa kiai dan pejabat publik ini memudahkan proses perumusan kebijakan pendidikan Islam di Madura, mulai arah kebijakan, format pendidikan Islam, hingga pendanaan lembaga pendidikan Islam.

Secara politis dan sosial, unsur relasi kuasa kiai pesantren dan pejabat publik di Madura sering dimanifestasikan dengan hubungan timbal balik antara keduanya. Berdasarkan posisi kiai sebagai guru dan tokoh yang sangat dihormati, maka pengaruhnya begitu hegemonik. Hal ini menurut akan menimbulkan klaim legitimasi dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang secara inheren “benar” dan legal (Papastephanou, 2019 : 83). Namun, pada gilirannya, tugas normatif kiai pesantren saat ini adalah menumbuhkan kesadaran pejabat publik yang lebih kritis terhadap kompleksitas permasalahan pendidikan Islam di Madura. Dengan begitu, rumusan

kebijakan pendidikan Islam dapat menuju ke arah yang lebih baik.

Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kiai di merupakan pemegang “otoritas” dalam persoalan keagamaan, yang berposisi sangat terhormat. Melalui posisi tersebut, kiai mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para santri dan masyarakat. Dengan potensi tersebut, tidak jarang figur kiai terlibat –atau sengaja dilibatkan- dalam penentuan kebijakan publik. Penulis menganalisis bahwa kiai memiliki *power of culture* sekaligus *power of legitimate* dalam proses tersebut. Di sini ada sebuah relasi yang dapat diindikasikan sebagai tindak kepedulian dalam bentuk saran atau kebijakan pendidikan Islam. Relasi tersebut dapat dipetakan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, patriarkis. Relasi ini merupakan bentuk kepemimpinan yang berdasarkan hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Relasi patriarkis antara kiai pesantren dan pejabat publik di Madura ditunjukkan oleh keterikatan, tanggung jawab moral dan emosional, kepercayaan, dan empati. *Kedua*, kolegial. Relasi ini merupakan sebuah ikatan atau interaksi layaknya mitra atau teman sejawat. Relasi kolegial terjadi di mana beberapa pihak dapat mempengaruhi satu sama lain dengan kuasa berbeda. Dalam pandangan Michel Foucault, relasi kuasa tersebut terjadi karena kiai memiliki kuasa ilmu (*power of knowledge*) dan pejabat publik memiliki kuasa politik (*power of politics*). Relasi kuasa antara keduanya terjadi merujuk pada formalitas keadatan masyarakat Madura. Relasi otoritas kiai dan pejabat publik ini memudahkan proses perumusan kebijakan pendidikan Islam di Madura, mulai arah kebijakan, format pendidikan Islam, hingga pendanaan lembaga pendidikan Islam.

Daftar Rujukan

- Anderson, James E. *Public Policymaking: An Introduction 7th Edition*. Houghton Mifflin Company, 1998.
- AR, Zaini Tamin. “Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH . M . Hasyim A Sy ’ Ari).” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, vol. 2, no. 2, 2015, pp. 323–45.
- Auyero, Javier, et al. “Patronage Politics and Contentious Collective Action: A Recursive Relationship.” *Latin American Politics and Society*, vol. 51, no. 1, 2009.
- Bogdan, Robert, and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Allyn Bacon, 1992.
- Deacon, Roger. “Capacity-Communication-Power: Foucault on Contemporary Education.” *Perspectives in Education*, vol. 23, no. 1, 2005.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research, Penerj. Dariyatno Dkk*. Pustaka Pelajar, 2009.
- Dreyfus, Hubert L., and Paul Rabinow. *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. The University of Chicago Press, 1983.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, 2002.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Loughman, 2001.
- Faridl, Miftah. “Peran Sosial Politik Kyai Di Indonesia.” *Jurnal Sositologi*, vol. 6, no. 11, 2007, pp. 238–43.
- Foucault, Michel. *Discipline & Punish: The Birth of the Prison*. Allen Lane, 1977.
- . *Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books, 1980.
- . *The Archaeology of Knowledge*. Routledge, 1989.
- . “*The Order of Discourse*”, in Michael Shapiro (Ed.) *Language and Politics*. NYU Press, 1984.

- Halpin, David, and Barry Troyna. *Researching Education Policy: Ethical and Methodological Issues*. The Falmer Press, 1994.
- Hindess, Barry. *Discourse of Power: From Hobbers to Foucault*. Blackwell Publishers, 1996.
- Ingram, David. "Foucault and Habermas [The Cambridge Companion to Foucault, 2nd Edition]." *History of the Human Sciences*, vol. 9, no. 2, 2005.
- Ja'far, Suhermanto. "Politik Kaum Santri Dalam Sejarah Indonesia." *Jurnal Review Politik*, vol. 02, no. 02, 2012, pp. 265–81.
- Kittel, Bernhard, et al. "Knowledge, Power, and Self-Interest." *Journal of Public Economics*, vol. 150, 2017.
- Papastephanou, Marianna. "Political Education in Times of Political Apathy and Extreme Political Pathos as Global Ways of Life." *Educational Studies in Japan: International Yearbook*, no. 13, 2019, pp. 81–95.
- Patton, Paul. "Foucault 's Subject of Power." *Political Theory Newsletter*, vol. 6, no. 1, 1994.
- Siddiq, Akhmad. "Peran Kiai Dalam Pemilukada Di Pamekasan 2008." *Jurnal Review Politik*, vol. 2, no. 1, 2012.
- Speranza, Carly R., and Angela Pierce. "Development of a Personal Leadership Philosophy." *Journal of Leadership Education*, vol. 18, no. 3, 2019.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. M. Shodiq. Pustaka Pelajar, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2009.
- Woermann, Minka. "Interpreting Foucault: An Evaluation of a Foucauldian Critique of Education." *South African Journal of Education*, vol. 32, no. 1, 2012.